

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, di the Great Hall of the People in Beijing, China, Senin (1/4/2024). (ist.x.CGA)

TAK LAZIMNYA PERTEMUAN PRABOWO DAN PRESIDEN CINA

Belum Resmi Dilantik,
Mencuat Isu Rivalitas AS

Media asing, Reuters dan Time menyoroti kunjungan Presiden Terpilih Indonesia Prabowo Subianto ke Cina dan pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, Senin (1/4/2024). Prabowo berkunjung atas undangan Xi untuk membahas hubungan dua arah. Padahal, veteran politik berusia 72 tahun itu baru belum resmi dilantik sebagai pemimpin Indonesia. Hal inipun dinilai tak lazim terjadi. Apalagi kenyataan saat ini, sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) RI tahun 2024 masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK)--Baca Hal 2. Di sisi lain, media Cina Global Times mengungkapkan adanya harapan besar dari kedua belah pihak agar momentum hubungan persahabatan akan terus dipertahankan. Namun, mereka juga menuliskan para analis menyisipkan keraguan keberpihakan Indonesia atas rivalitas yang kini dilakukan Cina dan Amerika Serikat (AS), serta Barat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Cina menilai kunjungan kerja yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto ke negaranya membuktikan pentingnya hubungan bilateral Indonesia dengan Cina. Namun dari sisi pemerintah Indonesia sendiri--Kemlu ataupun istana-- hingga berita ini dibuat belum mengeluarkan pernyataan resmi.

Baca di hal 11....

**Government (Hal.2)
4 Menteri Jokowi
Bakal Jadi Saksi
Sidang Sengketa
Pilpres**

JADWAL IMSAKIYAH RAMADAN 1445 H/2024 DKI JAKARTA & SEKITARNYA

TANGGAL	01 Apr 2024	02 Apr 2024	03 Apr 2024	04 Apr 2024	05 Apr 2024	06 Apr 2024	07 Apr 2024	08 Apr 2024
IMSAK	04:30	04:30	04:30	04:30	04:30	04:29	04:29	04:29
SUBUH	04:40	04:40	04:40	04:40	04:40	04:39	04:39	04:39
TERBIT	05:52	05:52	05:52	05:51	05:51	05:51	05:51	05:51
DUHA	06:19	06:19	06:19	06:19	06:19	06:19	06:18	06:18
ZUHUR	12:00	11:59	11:59	11:59	11:59	11:58	11:58	11:58
ASAR	15:14	15:14	15:14	15:14	15:14	15:14	15:14	15:14
MAGHRIB	18:00	18:00	17:59	17:59	17:59	17:58	17:58	17:57
ISYAH	19:09	19:09	19:08	19:08	19:07	19:07	19:07	19:06



4 Menteri Jokowi Bakal Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres MK Panggil Sri Mulyani, Risma, Airlangga, dan Muhadjir pada 5 April

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memanggil 4 orang menteri kabinet Jokowi untuk berbicara di dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024) mendatang. Keempat menteri itu meliputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia Para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo, Senin (1/4/2024).

Satu pihak lain yang akan dipanggil MK pada hari itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Suhartoyo menegaskan, pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon, yang memang sebelumnya meminta agar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil Mahkamah. Ia berujar, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat (5/4/2024)," jelas Suhartoyo.

Sebelumnya, MK membuka kans menghadirkan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024, sebagaimana permintaan pemohon: Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Namun demikian, Ketua MK Suhartoyo menegaskan, dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi/ahli pemohon. Sehingga, jikapun dihadirkan, maka menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi/ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan Mahkamah.

"Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan. Sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim," kata dia dalam sidang lanjutan, Kamis



Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (pilpres) 2024, Senin (1/4/2024) pagi. Badan itu memeriksa para saksi dan ahli dari pemohon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin). Ist

(28/3/2024).

"Sehingga nanti kalau dihadirkan juga, Mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan," tambah Suhartoyo.

Kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh. Otto berujar, seharusnya dalam perkara sengketa seperti ini, beban pembuktian ada pada pemohon sebagai pihak yang mendalilkan terjadinya pengalihan sumber daya negara oleh Istana.

"Mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Perlu juga dipertimbangkan relevansi kehadiran para menteri tersebut untuk perkara ini," sebut Otto.

Namun usai sidang, tim Prabowo-Gibran mengaku tak masalah dengan kehadiran 4 menteri. "Kami terus terang saja fine-fine (baik-baik) saja," kata Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, usai sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin (1/4/2024).

Bahkan, klaim dia, pihaknya lebih yakin jika keempat menteri itu bersedia datang untuk menjelaskan tuduhan politisasi bantuan sosial. Sebab, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Menurut Otto, saksi yang lain hanya menjelaskan secara sepotong-potong, sedangkan para menteri itu bisa memberikan keterangan secara utuh.

"Kalau para menteri ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain," tutur Otto.

Dia optimistis, Tim Pembela Prabowo-Gibran akan mendapatkan posisi yang lebih baik dengan kesaksian dari Sri Mulyani, Risma, Muhadjir, dan Airlangga pada sidang Jumat mendatang. "Karena semua menteri-menteri itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini," ucap Otto.

Airlangga Tunggu Undangan, Menkeu Yebsr Senyum

Usai menghadiri buka puasa bersama di Istana Negara, sore ini, Kamis (28/3/2024), Sri Mulyani

sempat dimintai tanggapan soal permintaan menjadi saksi di sengketa Pilpres. Namun, ketika ditanya awak media dia sama sekali tak bicara sepele kata pun dan hanya melemparkan senyum simpul.

Di satu momen ketika ditanyakan apakah sudah mendengar kabar soal dirinya diminta jadi saksi sengketa Pilpres, Sri Mulyani hanya menggelengkan kepalanya.

Setelah itu dia sama sekali tak menjawab ataupun menanggapi satupun pertanyaan dari awak media dan langsung masuk ke dalam mobil. Setelah itu dia meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan.

Derasnya aliran bansos dengan nilai jumbo menjelang pemilu Februari lalu membuat banyak pihak menilai bahwa telah terjadi upaya politisasi program pemerintah.

Sebelumnya Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan, pada Selasa, 19 Maret 2024 mengatakan terjadi lonjakan tajam dalam realisasi di awal 2024 bahkan angkanya naik hingga 135 persen dari tahun sebelumnya.

"Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun atau naik 135 persen di banding tahun sebelumnya," ucap Sri Mulyani.

Terkait pemanggilan ini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan dia masih menunggu surat panggilan menjadi saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami tunggu panggilannya. Undangannya belum ada," katanya di Jakarta, Senin (1/4/2024).

Airlangga dipanggil dengan kapasitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju. "Kalau dipanggil MK, mesti ada undangannya dong," ujar Airlangga.

Terpisah Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai dipanggilnya 4 menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menjadi pintu masuk gagalannya

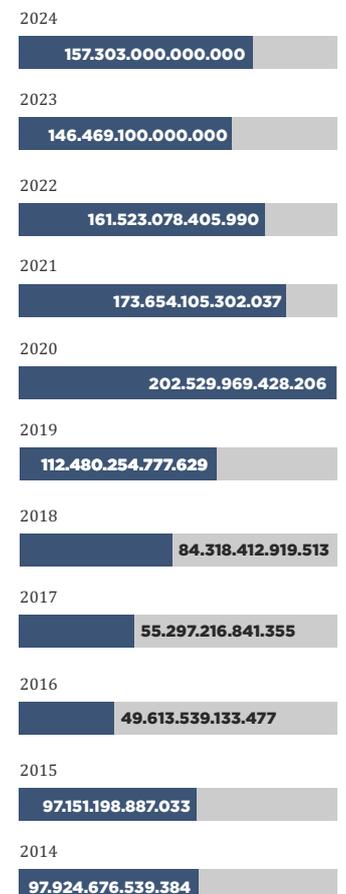
Prabowo-Gibran jadi pemenang Pilpres 2024. Diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan bahwa pasangan Prabowo-Gibran menjadi pemenang di Pilpres 2024.

"Isu Bansos menjelang pemilu ini menarik, meskipun berbeda UU dengan penyelenggaraan pemilu. Tetapi bisa saja menjadi pintu masuk gagalannya Prabowo diputuskan menang oleh KPU," kata Dedi dihubungi Senin (1/4/2024).

Hal itu dinilainya karena jika terbukti bansos ditujukan untuk politik uang. Terlebih tidak ada UU yang menjembatani kegiatan bansos itu. "Maka Presiden Jokowi tidak saja menghadapi kegagalan melihat putranya Gibran dilantik. Tetapi juga potensial hadapi pemakzulan melalui hak angket karena terbukti langgar UU," terangnya.

Menurutnya nantinya keterangan empat menteri tersebut akan konfrontatif. "Utamanya antara Risma dan lainnya. Risma dalam rapat dengan DPR sudah menjelaskan bahwa ia tidak tahu menahu kuota bansos menjelang pemilu," kata Dedi. (Wid,rls,ist,ant/dya)

ANGGARAN BANSOS DALAM APBN INDONESIA (2014-2024)*



Sorotan Kala UU MD3 Masuk Prolegnas 2024 DPR RI Tepis terkait Revisi Posisi Ketua



Dokumen foto saat BEM Seluruh Indonesia (SI) menggelar aksi tolak UU MD3 di depan Gedung Mahkamah Konstitusi pada Maret 2018 lalu karena dinilai mencederai demokrasi. (dok)

JAKARTA- Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, membenarkan revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2024. Tetapi dia menepis jika revisi UU MD3 dilakukan untuk mengubah pasal aturan penempatan kursi pimpinan DPRRI.

Hal itu merespons kabar Golkar hendak merebut kursi Ketua DPR RI dari PDIP selaku pemenang Pemilu. Dia menegaskan UU MD3 direvisi dalam rangka melepas DPRD dari peraturan perundangan sehingga tersisa menjadi UU MD2.

"Kalaupun itu benar, dan ternyata itu informasi benar, itu dalam rangka perbaikan kinerja seperti MPR, DPR, DPD, dan itu sebetulnya MD2, karena DPRD sudah tidak diatur dan sudah masuk Undang-undang Pemerintah Daerah," kata Doli di Gedung DPR RI, Senin (1/4/2024).

Dia juga mengungkapkan pihaknya yang dipimpin hendak membuat rancangan Undang-undang Omnibus Law terkait aturan politik. Salah satu hak yang akan dibahas adalah mengenai aturan dan kewenangan DPRD. "Kami di Komisi II, rancangan Undang-undang paket politik, atau Omnibus Law Politic, kami mendorong Undang-undang tentang DPRD," kata Doli.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menuturkan, pihaknya tak ambil pusing perihal rancangan revisi dalam Prolegnas tersebut. "Kayaknya belum tahu ya, karena kalau Prolegnas masuk kan

tentu dari dulu banyak sekali UU masuk Prolegnas. Long list ya apalagi, yang shortlist saja banyak yang tidak kita garap," kata Habiburokhman.

Berbeda dengan Doli, Habiburokhman optimistis tak akan ada perubahan signifikan mengenai UU MD3. Termasuk mengenai aturan kursi Ketua DPR RI. "Ini kan waktu tinggal berapa bulan apakah masuk akal merubah MD3," kata Habiburokhman.

PDIP Klaim Berhak Atas Kursi Ketua

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hastu Kristiyanto menegaskan bahwa pihaknya menjadi pemenang Pemilu 2024. Partai berlambang kepala banteng itu meraih suara sebanyak 16.72 persen.

Ia sendiri menghargai Partai Golkar yang memastikan tak akan mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Artinya, posisi Ketua DPR akan menjadi milik PDIP.

"Alhamdulillah kalau sudah dibantah bahwa tidak ada upaya untuk mengubah undang-undang MD3 dari Golkar. Sehingga bantahan kami maknakan dalam konteks seperti itu," ujar Hastu di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Menurutnya, tak tepat jika revisi UU MD3 dilakukan benar-benar

setelah kontestasi selesai. Sudah seharusnya undang-undang tersebut dijalankan sesuai dengan norma yang ada, termasuk ihwal posisi Ketua DPR. "Itu suatu aturan yang sangat sesuai dengan suara rakyat dan sistem proporsional itu juga harus dijabarkan dalam proporsionalitas terhadap penempatan jabatan-jabatan strategis di lembaga legislatif," ujar Hastu.

Ketua DPR Puan Maharani menanggapi adanya isu yang menyebut lembaganya akan kembali Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Bahkan, ia menyebut pimpinan DPR lain dari lintas fraksi tak pernah mendengar isu tersebut.

Diketahui, terdapat isu yang menyebut DPR akan kembali merevisi UU MD3. Revisi tersebut bertujuan untuk merebut posisi ketua

DPR yang saat ini diperebutkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.

"Pak Dasco malah bilang nggak denger (ada isu revisi UU MD3), kita kompak dan kita menghargai bahwa UU MD3 itu tetap harus menjadi satu undang-undang yang memang harus dihargai, dilaksanakan, dan dihargai di proses yang ada di DPR," ujar Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Dalam UU MD3 teranyar, pemegang pemilihan legislatif (Pileg) yang memiliki hak menduduki kursi ketua DPR. Dalam hal ini adalah Fraksi PDIP yang berhasil memenangkan kontestasi pada 2019 dan 2024.

"Pemegang pemilu yang nantinya akan, pemegang pemilu legislatif ya, yang seharusnya kemudian nanti berhak untuk menjadi ketua DPR, itu yang bisa saya sampaikan," ujar Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku partainya belum mendekati fraksi-fraksi di DPR untuk merevisi UU MD3. Dalam UU MD3, tertulis bahwa kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai pemenang pemilu. Sementara, suara Golkar di Pemilu 2024 berada di bawah PDIP, yang artinya PDIP sebagai pemenang mendapat jatah kursi Ketua DPR.

Adapun Golkar berada di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sedangkan PDIP mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. "Belum ada sama sekali," ujar Airlangga saat ditemui di kantor DPP

Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (29/3/2024).

Airlangga lantas mengingatkan bahwa Golkar sudah terbiasa mendapat kursi Ketua DPR sejauh ini. Meski demikian, Airlangga menegaskan belum ada upaya untuk merevisi UU MD3 demi posisi Ketua DPR. "Golkar kan biasa punya kursi. Tapi belum ada upaya," imbuhnya. (wid,rls,ant,ist/dya)

JEJAK REVISI UU MD3 SEJAK 2014-2019

1.KMP vs KIH

Revisi Undang-Undang MD3 kala itu disahkan pada 8 Juli 2014, sehari menjelang Pemilu Presiden 2014. Prosesnya berlangsung setelah Pemilu Legislatif 2014 selesai. Saat itu PDI-P keluar sebagai pemenang. Akibat revisi Pasal 84 tentang penetapan pimpinan DPR, PDI-P selaku pemenang pemilu legislatif tak mendapat kursi pimpinan DPR. Sebab, kelompok oposisi berhasil mengubah aturan pemilihan pimpinan DPR berdasarkan sistem paket, yang sebelumnya berdasarkan sistem proporsional. Selain mengubah sistem penetapan pimpinan DPR, revisi UU MD3 juga mengubah Pasal 245, di mana pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana tak butuh izin presiden, melainkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

2.Akomodasi KIH ke pimpinan AKD

Revisi UU MD3 dilakukan sebagai solusi mengakhiri konflik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Yaitu dengan mengakomodasi KIH ke dalam unsur pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berupa sejumlah komisi dan badan. Revisi tersebut menambah satu kursi pimpinan AKD sehingga perwakilan KIH bisa masuk ke dalamnya. Pada revisi kali ini, ada delapan pasal UU MD3 yang dilakukan perubahan oleh DPR, yakni Pasal 74 Ayat 3, 4, 5 dan 6; Pasal 97 Ayat 2; 98 Ayat 7, 8 dan 9; Pasal 104 Ayat 2; Pasal 109 Ayat 2; Pasal 121 Ayat 2; dan Pasal 152 Ayat 2.

3.PDI-P Dapat Kursi Pimpinan DPR

Revisi UU MD3 pada Februari 2019 ini bernuansa pengakomodasian partai pemenang pemilu legislatif, yakni PDI-P yang tak kunjung mendapat kursi pimpinan DPR dan MPR. Meski tinggal 1,5 tahun DPR periode 2019-2024 akan berakhir, PDI-P tetap bersikeras memperjuangkan jabatan tersebut. Akhirnya DPR sepakat mengubah Pasal 84 tentang komposisi pimpinan DPR. Kursi pimpinan DPR ditambah satu dan diberikan untuk untuk PDI-P selaku partai pemilik kursi terbanyak. Kursi pimpinan juga ditambah dan diberikan kepada tiga partai, yakni PDI-P, Gerindra dan PKB. Ada pula revisi pada Pasal 245 tentang pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana. Pada 2015, ketentuan pemeriksaan atas seizin MKD dibatalkan Mahkamah Konstitusi sehingga kembali atas seizin presiden. Namun, DPR dalam revisi kali ini menambahkan ketentuan pertimbangan MKD sebelum presiden memberi izin. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi anggota DPR yang tertangkap tangan.

4.Sepuluh Kursi Pimpinan MPR

Revisi UU MD3 kembali dilakukan. Seluruh fraksi di DPR sudah menyatakan persetujuannya dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9/2019) siang. Berdasarkan draf dari Baleg, pada intinya revisi ini hanya mengubah jumlah pimpinan DPR menjadi 10 orang, yang terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi agar setiap fraksi di DPR mendapat jatah pimpinan.

Pro-Kontra Pencabutan Aturan Wajib Ekskul Pramuka NADIEM DINILAI 'KEBABLASAN', TAPI NETIZEN BERI DUKUNGAN

JAKARTA-Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim mengesahkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 Tahun 2024. Salah satunya menghapus kegiatan Pramuka sebagai ekstrakurikuler (ekskul) wajib di sekolah. Pramuka akan menjadi kegiatan opsional alias bisa dipilih oleh murid.

Selama ini, Pramuka diwajibkan di sekolah sebagai salah satu aktivitas pengembangan diri siswa. Di dalamnya diajarkan beragam keterampilan yang dibutuhkan ketika berada di alam bebas. Misalnya kode morse, memasak dengan perkakas seadanya, membangun tenda, tali-temali, hingga membangun api unggun. Permen soal penghapusan Pramuka sebagai aktivitas wajib di sekolah ditetapkan pada 25 Maret 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 26 Maret 2024.

Pro-kontra pun mencuat terhadap keputusan Nadiem untuk menghapus kewajiban Pramuka yang sudah mengakar dalam sistem pendidikan di Indonesia tersebut.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai keputusan Nadiem menghapus Pramuka ekskul wajib di sekolah adalah kebablasan. Sebab, menurut dia, Pramuka merupakan paket komplit yang berperan penting dalam pembentukan karakter pelajar Pancasila.

"Kebijakan penghapusan Pramuka sebagai ekskul wajib bagi kami kebablasan. Pramuka selama ini telah terbukti memberikan dampak positif bagi upaya pembentukan sikap kemandirian, kebersamaan, cinta alam, kepemimpinan, hingga keorganisasian bagi peserta didik," kata Huda dalam keterangannya, Senin (1/4/2024).

"Kegiatan kepanduan ini juga telah berkontribusi bagi tertanamnya rasa cinta Tanah Air yang menjadi karakter khas pelajar Pancasila," ujarnya lagi.

Huda mengatakan, menjadikan kegiatan ekstrakurikuler termasuk Pramuka sebagai kegiatan sukarela bagi peserta didik bisa jadi kebijakan terbaik. Kendati demikian, dia berpandangan bahwa semestinya Nadiem memahami bahwa tidak semua peserta didik maupun wali murid yang mempunyai preferensi cukup untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Jangan semua dibayangkan peserta didik kita semua ada di kota-kota besar yang mempunyai akses informasi cukup untuk memahami kebutuhan pengembangan diri mereka. Bagaimana dengan peserta didik yang ada di pelosok nusantara. Bisa jadi mereka akan memilih tidak ikut ekskul karena hanya bersifat sukarela," kata Huda.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai klausul adanya kegiatan ekskul bersifat wajib merupakan tindakan



(Ilustrasi) Kemendikbud tegaskan sekolah tetap wajib sediakan ekskul Pramuka, tapi keikutsertaan sukarela & perkemahan tak wajib. (Dok)

afirmasi. Dengan adanya kewajiban ini, menurut Huda, penyelenggara sekolah, peserta didik, maupun tenaga pendidik mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakanannya. "Dan dipilihnya Pramuka sebagai ekskul wajib tentu mempunyai alasan dan dasar hukum jelas. Di mana Pramuka secara historis telah terbukti sebagai kegiatan yang efektif dalam menanamkan rasa cinta Tanah Air, mengajarkan semangat kemandirian dan kebersamaan, sekaligus melatih kepemimpinan dan organisasi," ujarnya.

"Negara juga mengakui arti penting Pramuka dengan melahirkan UU Nomor 12/2010 tentang Gerakan Pramuka," kata Huda lagi. Dia pun menegaskan bahwa saat ini Pramuka masih layak dijadikan ekskul wajib di sekolah.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo menilai gerakan pramuka berperan penting dalam membangun karakter manusia Indonesia. "Jadi kalau melihat perkembangan Gerakan Pramuka sampai sekarang sangatlah strategis dalam upaya pembangunan karakter bangsa, terlebih dalam membantu pencapaian tujuan pendidikan nasional itu sendiri, yaitu menciptakan manusia Indonesia yang bermartabat, cerdas dan bertaqwa," kata Bachtiar dalam keterangan tertulis, Senin (1/4/2024).

Bachtiar juga menyebut gerakan pramuka sejalan dengan tujuan Kemendikbudristek dan kementerian serta lembaga terkait. Terlebih, kata Bachtiar, terdapat satuan dari gerakan pramuka yang turut berkontribusi dengan menyelenggarakan kegiatan pramuka di kementerian/lembaga tertentu.

"Seperti di Kemendikbudristek dengan nama Saka Widya Budaya Bakti dimana Pramuka mengajarkan pentingnya pendidikan praktis di bidang pendidikan dan kebudayaan seperti seni, tradisi dan nilai budaya. Kemudian Saka Bakti Husada di kementerian kesehatan yang memberikan bekal pengetahuan bagi anggota Pramuka di bidang kesehatan seperti penanggulangan penyakit, pengetahuan tentang gizi, serta

perilaku hidup bersih dan sehat," ujarnya.

Jadi Ekskul Opsional

Sebelumnya, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo menegaskan bahwa semua sekolah mulai jenjang dasar sampai menengah wajib menyediakan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum Merdeka. Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah mewajibkan sekolah menyelenggarakan minimal satu ekstrakurikuler. Kemudian, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka juga mewajibkan satuan pendidikan untuk memiliki gugus depan.

"Permendikbudristek 12/2024 tidak mengubah ketentuan bahwa Pramuka adalah ekstrakurikuler yang wajib disediakan sekolah. Sekolah tetap wajib menyediakan setidaknya satu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Pramuka," ujar Anindito, dilansir dari rilis Kemendikbud, Senin (1/4/2024).

Kata kunci 'Nadiem' pun masuk dalam jejeran trending topic di platform X. Hingga berita ini dibuat, Senin (1/4/2025), lebih dari 3.000 tweet terkait membahas soal Nadiem dan kebijakannya soal ekstrakurikuler Pramuka.

Banyak netizen yang bernostalgia soal pengalaman mereka mengikuti aktivitas Pramuka ketika sekolah. Mereka mengklaim aktivitas tersebut memiliki manfaat positif bagi pengembangan karakter. Namun, tak jarang pula yang mendukung kebijakan Nadiem untuk menjadikan Pramuka sebagai ekstrakurikuler opsional. Siswa tak diwajibkan ikut, tetapi yang tertarik boleh mengikutinya.

"KENAPA GA DARI DULU. Jujur Pramuka CAPEK BANGET. Bahkan dibandingkan semua mapel, PRAMUKA lebih menguras energi dan pikiran, sempat kena mental juga gara-gara PRAMUKA," cuit akun @convomfs. (wid,rls,x,ist/dya))

PERUBAHAN ATURAN EKSKUL PRAMUKA

Aturan Lama: Permendikbud No. 63 Tahun 2014.

- Pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang diwajibkan untuk peserta didik di pendidikan dasar dan menengah. "Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah," tulis Permendikbud No. 63 Tahun 2014 Pasal 2.

Aturan Baru: Peraturan Mendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," tulis Pasal 34 Bab V Bagian Ketentuan Penutup Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024.
- Dalam aturan terbaru, ekstrakurikuler memiliki visi untuk mengembangkan berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
- Kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor serta minat dan bakat peserta didik. Adapun keikutsertaan ekskul, termasuk Pramuka, merupakan sukarela. "Keikutsertaan Peserta Didik dalam Ekstrakurikuler bersifat sukarela," tulis Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 Pasal 24.
- Kinerja peserta didik dalam ekstrakurikuler akan dinilai dan dideskripsikan dalam rapor. Kriteria keberhasilannya meliputi proses dan hasil capaian kompetensi dalam ekstrakurikuler yang dipilihnya. Adapun penilaian atau asesmen dilakukan secara kualitatif.
- Jenis kegiatan yang termasuk dalam ekstrakurikuler adalah:
 - 1. Krida**
Misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya.
 - 2. Karya ilmiah**
Misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya.
 - 3. Latihan olah-bakat atau latihan olah-minat**
Misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya.
 - 4. Keagamaan**
Misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, retreat.
 - 5. Bentuk kegiatan lainnya**



KPU Tetapkan Pilkada November 2024 Digelar di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/kota

JAKARTA-KPU menetapkan Pilkada 2024 digelar 27 November 2024. Ini menegaskan tidak ada lagi perubahan jadwal Pilkada 2024 ke September seperti yang sempat dibahas dengan DPR dan Kemendagri.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan Pilkada 2024 diikuti 37 dari 38 provinsi. Proses untuk Pilkada 2024 sudah dimulai."Untuk pemilihan gubernur (dilakukan) pada 37 provinsi, kalau DIY kan tidak melalui pilkada langsung," ujar Hasyim dikutip dari Antara, Senin (1/4/2024).

Yogyakarta punya aturan istimewa sehingga tidak digelar Pilkada serentak. Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Selain di tingkat provinsi, Pilkada juga digelar di 508 kabupaten/kota. Harusnya ada 514 kabupaten/kota yang menjalani Pilkada, tapi 6 kabupaten/kota di Jakarta tidak menjalani pemilihan."KPU menyelenggarakan peluncuran Pilkada Serentak 2024 yang rencananya untuk pemungutan suara akan digelar nanti pada tanggal 27 November 2024," jelasnya.

Diketahui, KPU resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta, Minggu (31/3/2024).

Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum) RI Idham Holik



Ketua KPU Hasyim Asy'ari, saat peluncuran Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Pelataran Candi Prambanan, Sleman, Minggu (31/3/2024). (dok.kpuri)

mengatakan bahwa pendaftaran calon kepala daerah melalui jalur perseorangan atau independen akan dibuka pada Minggu, 5 Mei 2024."Peraturan KPU tentang pencalonan dari jalur perseorangan. Karena memang tanggal 5 April 2024 tahapan pencalonan untuk perseorangan sudah dimulai," ujar Idham saat ditemui awak media di Yogyakarta, Minggu (31/3/2024).

Menurutnya, KPU juga sudah melakukan sosialisasi formulir dukungan pemilih kepada calon perseorangan. Idham menjelaskan bagi para tokoh yang ingin menjadi bakal calon perseorangan dapat berkomunikasi dengan KPU Provinsi,

seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.

"Rekan-rekan di daerah, insyaallah siap akan memberikan fasilitas pelayanan berkaitan dengan pencalonan perseorangan," katanya.

Pj Kepala Daerah Harus Mundur

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menegaskan pejabat kepala daerah harus mundur dari jabatan apabila ingin mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan pada 27 November 2024.

"Penjabat kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum

pelaksanaan pilkada, jika ingin ikut pilkada," tegas Tito Karnavian pada rapat koordinasi melalui konferensi video (zoom meeting).

Penjaga kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah, jelas Mendagri, tidak menggunakan jabatan untuk politik praktis."Seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada," tegasnya.

Netralitas penjabat kepala daerah dalam pilkada diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang yang ditetapkan tanggal 1 Juli 2016.

Pada pasal 7 ayat (2) huruf q, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan.

Persyaratan itu disebutkan pada ayat (1). menurut Mendagri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q: tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota.

Ketentuan pada regulasi tersebut, lanjut dia, untuk mencegah penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota. (wid,ant,ist/dya)

Pilgub Jatim

Hasto Bicara Peluang PDIP-Gerindra Usung Khofifah



Puan Maharani berbincang dengan Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri pelantikan pengurus Muslimat NU tahun lalu. (dok)

JAKARTA- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara mengenai peluang partainya berkoalisi dengan Partai Gerindra mengusung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jawa Timur

peluang PDIP berkoalisi dengan Gerindra mengusung Khofifah.

Hasto pun mengakui partainya melirik petahana Khofifah dalam

(Jatim) 2024 mendatang. Hasto memandang kerja sama politik dengan parpol lain dalam kontestasi pilkada merupakan hal yang lumrah.

"Kalau di dalam pilkada, kerja sama dengan partai politik, karena syaratnya adalah 20%, satu hal yang biasa dilakukan oleh partai," kata Hasto kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). Hasto menjawab soal

kontestasi Pilgub Jatim mendatang. Tak hanya Jatim, PDIP juga melakukan pemetaan terhadap calon kepala daerah potensial di wilayah lainnya.

"Jadi pilkada kita lakukan suatu pemetaan secara menyeluruh tetapi detail setiap daerah. Jatim, Jateng, Bali dan seluruh wilayah Indonesia kami lakukan pemetaan," jelas Hasto.

Hasto memandang ada perbedaan dinamika politik dalam gelaran Pemilu di tingkat nasional dan tingkat daerah. Sehingga, komunikasi politik dengan seluruh parpol terus bergulir demi mencari pemimpin terbaik."Karena beda ruang lingkungannya antara pilpres dengan pilkada. Sehingga komunikasi-komunikasi politik memang dilakukan untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang terbaik, termasuk di Jatim, berkomunikasi dengan Mbak Khofifah. Apapun beliau, seorang gubernur Jatim," terangnya.

"Dinamika politik di tingkat nasional, dengan dinamika politik di provinsi, kabupaten/kota itu berbeda.

Karena pilkada itu perspektifnya lebih ke lokal. Sehingga kerja sama memang dimungkinkan dengan Gerindra, Golkar, PPP, Perindo, Hanura, karena jangan lupa PPP, Perindo, Hanura banyak kursi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah buka-bukaan terkait pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2024. PDIP yang saat ini punya 21 kursi di DPRD Jatim memilih realistis soal Pilgub Jatim 2024."Kalau terkait Pilgub Jawa Timur kami akan realistis," kata Said usai acara buka bersama di Kantor PDIP Jatim, Minggu (31/3/2024).

Said mengaku PDIP sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan PAN terkait peluang koalisi di Pilgub Jatim 2024. Dia juga blak-blakan telah bertemu dengan Khofifah di suatu tempat yang secara khusus membahas Pilgub Jatim 2024. (wid,lutfi,ist,ant/dya)

Akhirnya Ketua Dewas Ditunjuk Jadi Plt Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang



Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Sempat gaduh diperbincangkan, akhirnya per tanggal 1 April 2024, masa jabatan Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang periode 2019-2024 resmi berakhir. Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menunjuk Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tugu Tirta, Handi Priyanto, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) untuk

memimpin salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Dalam menghadapi situasi ini, Pj Wahyu mengaku akan membentuk sebuah panitia seleksi (pansel) dalam minggu ini untuk memilih jajaran Direksi baru.

"Jadi Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Kota Malang, memang sudah diberhentikan karena habis

masa jabatan. Maka dengan adanya hal ini, kami akan membentuk pansel dalam minggu ini," ujar Wahyu, saat dikonfirmasi awak media, Senin (1/4/2024).

Wahyu menjelaskan, pembentukan pansel ini akan melibatkan koordinasi dengan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait, yang meliputi Sekretaris Daerah, Asisten Pemkot Malang, serta Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian, Infrastruktur, dan Sumber Daya Alam (PISDA) Kota Malang.

"Panselnya dibentuk dalam minggu ini, saya akan mengkoordinasikan dengan Pembina BUMD terkait siapa yang akan ditunjuk menjadi pansel," tambahnya.

Lebih lanjut, meskipun sempat ada asumsi bahwa pemilihan Direksi baru akan ditetapkan oleh Wali Kota definitif, namun menurut Pj Wahyu, hal tersebut tidak berlaku.

Usai berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Wahyu menjelaskan, proses pelaksanaan pemilihan calon Direksi baru akan berlangsung dalam batas waktu 6 bulan, dimulai dari pembentukan pansel hingga penetapan Direksi baru. Sehingga menurutnya proses tersebut

masih dapat dilakukan di bawah kepemimpinan Pj.

"Ya kita target paling tidak 2 bulan sudah harus clear semua," tukasnya.

Sebagai informasi, selain menjabat sebagai Ketua Dewas Perumda Tugu Tirta, Handi Priyanto saat ini juga tengah aktif menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang.

Sementara itu dalam pemberitaan sebelumnya, Pj Wahyu tak memungkiri jika dalam menentukan nasib kelanjutan Direksi Perumda Tugu Tirta, ia tak bisa serta merta mengambil keputusan. Hal ini lantaran ia mengaku tak cukup waktu untuk memberikan penilaian secara menyeluruh sebagai kuasa pemilik modal (KPM) Perumda Tugu Tirta, atas perjalanan kinerja Direksi perusahaan air Kota Malang tersebut.

Sehingga, meskipun telah mendapat laporan evaluasi kinerja dari Dewas, Wahyu mengaku masih harus menunggu kajian dari jajaran pembina BUMD.

"Karena saya kan memimpin Kota Malang sebagai Pj (penjabat) baru 6 bulan, sedangkan Direksi Perumda Tugu Tirta sudah 5 tahun," ujar Wahyu beberapa waktu lalu. (Santi/Dya)

Selama Libur Lebaran, Dinkes Kota Batu Siagakan 270 Nakes

BATU - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu mulai melakukan persiapan dalam menghadapi musim libur Lebaran tahun 2024 ini. Dalam upaya menjaga ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sekitar 270 tenaga kesehatan (Nakes) ditempatkan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) selama periode tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Kota Batu, Aditya Prasaja menekankan pentingnya antisipasi terhadap lonjakan kunjungan pasien selama libur Lebaran. Pasalnya dalam banyak kasus, Aditya menyebut libur Lebaran seringkali diiringi dengan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan.

"Kami memahami bahwa libur Lebaran sering menjadi momen untuk berkumpul dengan keluarga dan melakukan perjalanan. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat," ujar Aditya, saat dikonfirmasi awak media, Senin (1/4/2024).

Menurut Aditya, persiapan Dinkes



Layanan kesehatan Dinkes Kota Batu. (Dok. Puskesmas Bumiaji)

Kota Batu tidak hanya mencakup penempatan 270 Nakes, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan berbagai fasilitas kesehatan di Kota Batu. Ia mengatakan, hal tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan optimalisasi layanan kesehatan selama libur Lebaran.

"Tenaga kesehatan yang disiapkan terdiri dari berbagai profesi, termasuk dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan tenaga medis lainnya. Mereka akan ditempatkan di rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan pos kesehatan yang disediakan khusus selama libur Lebaran," tambahnya.

Lebih lanjut, Aditya menyebutkan pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas Kota Batu, akan dibuka selama 24 jam. Menurutnya, langkah ini penting diambil untuk menghadapi potensi peningkatan jumlah pasien selama periode libur Lebaran.

"Kami juga telah menyiapkan sistem triase dan penanganan darurat. Fasilitas kesehatan siaga juga telah dipersiapkan untuk menangani situasi darurat yang mungkin terjadi," jelasnya.

Dengan adanya persiapan dan koordinasi yang baik ini, Aditya mengharapkan masyarakat Kota Batu dapat merayakan libur Lebaran dengan aman dan nyaman. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan layanan kesehatan yang diperlukan selama periode libur.

"Jadi ini memang langkah kami dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga momen libur menjadi pengalaman yang menyenangkan dan aman bagi semua," tukasnya. (Santi/Dya)

SAHIRA ANJANI

Siapkan Peran Uci hingga Turunkan Berat Badan

AKTRIS Sahira Anjani, yang memerankan karakter Uci dalam film "Glenn Fredly The Movie" mengungkapkan tantangan yang dihadapinya selama proses persiapan untuk peran tersebut, salah satunya adalah terkait dengan penampilan fisiknya untuk menurunkan berat badan.

"Sebenarnya pas awal reading nanya sama Mas Lukman Sardi tentang badannya kak Uci segimana, perlu dikurisin tidak badanku dan katanya aman. Makan apa saja bisa berarti kan, sampe berapa hari kemudian dan reading terus mau makan, tiba-tiba asisten sutradara datang ngasih tau soal badannya kak uci difoto kecil banget. Jadi harus nurunin berat badan," kata Sahira di Jakarta.

Tak sampai di situ, awalnya sulit bagi Sahira untuk mendapatkan gambaran tentang kepribadian Uci. Namun, dengan keberanian, ia mengirim pesan langsung kepada Uci dan mendapat respon yang ramah.

Bahkan, pertemuan langsung dengan Uci dan kedua orangtua dari penyanyi Almarhum Glenn Fredly, sehingga mendapat masukan tentang peran yang akan dimainkannya.

"Dari reading sampe dua hari sebelum syuting itu susah banget mau minta ketemu sama kak Uci. Jadi, abu abu, dia orangnya gimana. Hanya bisa lihat lewat instagram, instagram juga

tidak ada unggahan cara ngomongnya dia seperti apa.

Akhirnya menerka-nerka aja kayanya orangnya galak dan tegas, tapi kan kalau tidak ketemu langsung sama orangnya tidak akan tahu," ujar Sahira.

Adapun, Film drama "Glenn Fredly The Movie" yang mengangkat kisah hidup penyanyi populer Indonesia Glenn Fredly telah merilis trailer dan poster resmi, akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 25 April 2024.

Film persembahan dari Time International Films dan Adhya Pictures yang diproduksi oleh DAMN! I Love Indonesia Pictures ini membawa penonton menyelami perjalanan hidup Glenn Fredly, mulai dari masa perjuangannya di dunia musik, hingga kisah cintanya yang menyentuh hati.

Soundtrack film ini juga menghadirkan kembali lagu-lagu hits Glenn Fredly yang tak lekang oleh waktu. Film ini juga akan menampilkan lagu baru ciptaan Glenn Fredly yang belum pernah dirilis, berjudul "Keluarga" yang dinyanyikan oleh Yura Yunita, pemenang Piala Citra FFI 2023 untuk pencipta lagu tema terbaik.

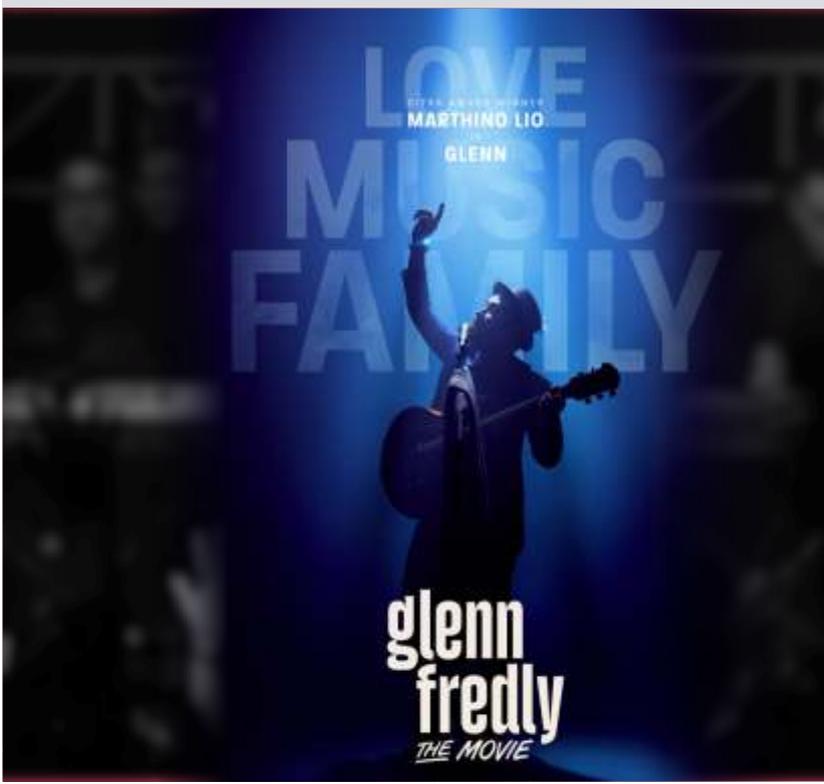
Film drama "Glenn Fredly The Movie" yang mengangkat kisah hidup penyanyi populer Indonesia Glenn Fredly telah merilis trailer dan poster resmi, akan tayang di seluruh bioskop

Indonesia pada 25 April 2024.

"Film ini dibuat dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada Glenn. Kami ingin menghadirkan kisah yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh hati dan memberikan inspirasi," kata sutradara Lukman Sardi dalam keterangannya di Jakarta.

Film persembahan dari Time International Films dan Adhya Pictures yang diproduksi oleh DAMN! I Love Indonesia Pictures ini membawa penonton menyelami perjalanan hidup Glenn Fredly, mulai dari masa perjuangannya di dunia musik, hingga kisah cintanya yang menyentuh hati. (Antara/berbagai sumber)

- •
- •
- •





PRINSIP 3J, MAKAN AMAN SAAT LEBARAN BAGI PENGIDAP DIABETES

HARI raya Idulfitri sangat identik dengan momen berkumpul dengan keluarga dan juga hidangan menu makanan yang beraneka ragam di atas meja.

Mulai dari makanan kecil, menu utama, hingga minuman yang menarik menjadi pemandangan yang sudah tidak asing lagi saat merayakan hari raya Idulfitri.

Ahli gizi dari RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo S.R. Wahyuningrum, SKM, RD membagikan kiat konsumsi makanan yang aman bagi pengidap diabetes saat hari raya lebaran.

Wahyuningrum menjelaskan, pola makan pengidap diabetes dianjurkan mengikuti prinsip 3J yakni jenis, jumlah, dan jadwal.

Dari aspek jenis, individu dengan diabetes didorong untuk mengonsumsi jenis makanan yang bervariasi dan memiliki kandungan gizi cukup.

"Kita konsumsi jenis makanan dengan bervariasi dan memenuhi syarat jadi yang berkarbohidrat, ada sumber protein baik hewani maupun nabati, ditambah serat dari sayur dan buah-buahan," kata Wahyuningrum dalam sebuah sesi diskusi daring yang digelar di Jakarta.

Selain jenis makanan, jumlah

makanan yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan takaran yang dianjurkan dan kebutuhan gizi untuk tubuh.

Kemudian, harus memperhatikan jadwal makan yang teratur. Dalam sehari dianjurkan makan tiga kali sehari ditambah dua kali makanan selingan.

"Pada saat puasa jadi dua kali makanan utama yaitu saat sahur dan berbuka dan dua kali makanan selingan pada saat buka puasa sebelum sholat maghrib dan makanan selingan lagi setelah sholat tarawih," ujarnya.

Adapun saat lebaran banyak dijumpai makanan yang mengandung kalori di antaranya ketupat, rendang, opor ayam, hingga kue kering.

Oleh karenanya, pengidap diabetes perlu mengatur konsumsi makanan saat lebaran agar tidak membahayakan kesehatan.

Wahyuningrum menganjurkan untuk mengambil hanya satu lauk setiap makan berat misalnya bisa memilih antara rendang atau opor ayam dengan catatan daging ayam dimasak tanpa kulit.

Sementara untuk konsumsi kue kering sebagai makanan selingan,

jumlah ideal yang disarankan adalah 4 sampai 5 buah dalam satu hari.

"Itu (konsumsi kue kering) tidak sekali makan dia sebagai pengganti makanan selingan bisa 2 buah selingan pagi 2 di selingan sore," ujarnya.

Kemudian, batasi konsumsi minuman manis atau dapat mengganti gula pasir dengan pemanis lain yang rendah kalori.

Anggota Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) itu juga mendorong konsumsi banyak sayuran seperti rebusan sayur hijau atau lalapan guna menambah asupan serat untuk tubuh.

Selain itu, penuhi kebutuhan air putih dengan meminumnya sebanyak delapan gelas dalam satu hari dan hal yang tidak kalah penting adalah lakukan rutinitas olahraga serta tetap minum obat sesuai anjuran dokter.

"Selain makannya sudah kita atur kemudian jangan lupa minum obat sesuai anjuran dokter. Jangan lupa tetap berolahraga jadi luangkan waktu setiap hari minimal 30 menit," saran Wahyuningrum.

Mengutip halodoc, sebaiknya jangan asal memilih makanan untuk dikonsumsi. Perhatikan jenis makanan yang masuk dalam tubuh

dapat menghindari kamu dari diabetes yang semakin parah.

Melansir Mayo Clinic, bagi pengidap diabetes, sebaiknya pilih makanan yang mengandung karbohidrat sehat, memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, dan lemak tak jenuh.

Perbanyak konsumsi sayuran, buah, makanan yang terbuat dari gandum, dan kacang-kacangan, agar kesehatan tetap terjaga selama merayakan hari raya. Jangan lupa untuk membatasi pengonsumsi makanan yang mengandung santan.

Mengatur waktu makan dengan baik membuat pengidap diabetes tidak akan mengonsumsi makanan secara berlebihan.

Jangan hindari waktu sarapan agar kamu tidak mengalami kelaparan saat menunggu makan siang. Kondisi lapar dapat menyebabkan kamu makan berlebihan yang memicu gangguan kesehatan pencernaan atau penyakit lainnya, seperti diabetes.

Melansir dari Healthline, mengonsumsi air putih bermanfaat bagi pengidap diabetes. Tubuh yang terhidrasi dengan baik membuat kadar gula dalam darah menjadi lebih stabil sehingga dapat mencegah diabetes (Antara)

"Kita konsumsi jenis makanan dengan bervariasi dan memenuhi syarat jadi yang berkarbohidrat, ada sumber protein baik hewani maupun nabati, ditambah serat dari sayur dan buah-buahan,"

S.R. Wahyuningrum, SKM, RD

IPHONE 16, KAMERA BALIK KE VERTIKAL SEPERTI IPHONE X

RUMOR kamera belakang iPhone 16 akan kembali tersusun secara vertikal, layaknya iPhone X, dibuktikan dengan adanya casing pertama yang diklaim untuk iPhone 16 Pro.

Melansir dari gsmarena, Sabtu (30/3/2024), casing tersebut menunjukkan letak tombol Capture yang berada di samping, dan hari ini model non-Pro mendapatkan perlakuan yang sama.

Dengan kata lain, bocoran casing baru, yang menunjukkan dua casing untuk model iPhone 16 dan iPhone 16 Plus.

Adapun, fitur Capture Button yang akan berfungsi untuk merekam video. Tidak seperti Action Button yang bisa diprogram fungsinya, seperti Capture Button hanya memiliki satu fungsi khusus yaitu untuk merekam video.

Bocornya desain casing ini menjadi penguat bahwa perubahan desain yang sering dirumorkan untuk kamera iPhone 16 dan iPhone 16 Plus yang akan datang.

Seperti yang terlihat dalam bocorannya, kedua sensor tidak lagi disusun secara diagonal di dalam bentuk kotak membundar atau seperti iPhone 11 hingga 15.

Bocoran tersebut juga diperlihatkan oleh reviewer teknologi dan otomotif Sonny Dickson lewat akun twitternya.

Tahun ini, kedua sensor tersebut akan diletakkan di bawah satu sama lain dalam tonjolan kamera vertikal, dengan susunan lampu kilat LED di bagian kanan tonjolan tersebut.

Prototipe terbaru untuk model iPhone 16 non-Pro memiliki dua cincin terpisah untuk dua kamera,

yang ditempatkan di permukaan yang ditinggikan berbentuk pil.

Hal ini membuatnya tampak seperti Apple mengambil inspirasi dari iPhone X, dari segi desain. Namun inti dari penataan ulang ini adalah agar kedua handset yang diluncurkan pada musim gugur ini dapat mendukung perekaman video spasial.

iPhone 16 dan iPhone 16 Plus juga dikatakan meminjam Tombol Aksi dari iPhone 15 Pro, serta tombol Capture yang peka terhadap tekanan yang juga dikabarkan untuk iPhone 16 Pro.

Meski demikian, masih terlalu dini dalam siklus desain iPhone sehingga banyak hal yang dapat berubah sebelum ponsel ini dirilis pada bulan September mendatang.

Sementara itu, fitur iPhone 16 yang dibocorkan sebelumnya disebutkan memiliki fitur kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang serupa dengan apa yang dilakukan Google dan Samsung dalam pembuatan teks-ke-gambar.

AI tersebut juga akan disertakan pula kemampuan untuk, antara lain untuk meringkas dokumen dan menerjemahkan konten.

Selain itu, prototipe baterai iPhone 16 kabarnya berkapasitas 3.355 mAh. Ukuran baterai ini melonjak 2,5 persen dari baterai iPhone 15 Pro yang berkapasitas 3.274 mAh.

Versi baterai baru ini juga dilaporkan memiliki cangkang logam yang sangat dingin. Bahkan, konektor juga didesain ulang untuk menunjukkan perbaikan.

Disinyalir, iPhone 16 akan memiliki fitur AI generatif eksklusif yang akan menjadi nilai jual utama

untuk perangkat baru tersebut.

Tak hanya AI yang dibuat mirip seperti yang ada di dalam Samsung, desain kamera hingga fitur-fitur barunya pun sama.

Capture Button

Bocoran lainnya mengenai iPhone 16 adalah fitur Capture Button yang akan berfungsi untuk merekam video.

Tidak seperti Action Button yang bisa diprogram fungsinya, seperti Capture Button hanya memiliki satu fungsi khusus yaitu untuk merekam video.

Melansir dari GSMarena, Capture Button akan ditempatkan di sisi kanan bawah iPhone 16, yang akan menggantikan antena mmWave.

Baterai besar

Dengan berbagai fitur baru, Apple juga berencana membuat iPhone 16 memiliki baterai super besar.

Meskipun tak naik jauh, namun perbaruan baterai ini dinilai menjadi kabar baik untuk para penggemar. Seorang kolektor Apple di X bernama akun @KosutamiSan, mencuitkan bahwa prototipe baterai iPhone 16 kabarnya berkapasitas 3.355 mAh.

Ukuran baterai ini melonjak 2,5 persen dari baterai iPhone 15 Pro yang berkapasitas 3.274 mAh. Versi baterai baru ini juga dilaporkan memiliki cangkang logam yang sangat dingin. Bahkan, konektor juga didesain ulang untuk menunjukkan perbaikan (Bisnis)



10 TIPS MENGONTROL EMOSI SAAT PUASA

BULAN puasa adalah bulan yang penuh rahmat dan keberkahan. Semua hal yang dilakukan selama bulan puasa, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan setimpal dengan apa yang dikerjakan.

Salah satunya adalah rasa sabar dan mengontrol emosi dengan baik. Saat berpuasa, umat muslim dianjurkan untuk menahan hawa nafsu dan emosi supaya puasa yang dilakukan dapat berjalan dengan baik hingga akhir.

Dilansir dari onlymyhealth.com, Sabtu (30/3/2024), tidak semua orang mampu menahan emosi saat menjalani aktivitas. Mengontrol emosi memiliki dampak yang sangat baik bagi kesehatan, terutama terhindar dari tekanan darah yang tinggi, dan serangan jantung.

Simak tips untuk mengontrol emosi saat puasa:

1. Melakukan rutinitas yang seimbang

Mempertahankan rutinitas harian Anda secara seimbang dapat mengatur segala kapasitas Anda dalam beraktivitas. Hal ini juga mempengaruhi pada jam tidur Anda dan memberikan rasa stabilitas yang baik untuk mengurangi rasa stres serta depresi pada diri.

2. Tetap terhidrasi

Berpuasa cukup membuat tubuh merasa lelah dan kurang menerima asupan nutrisi serta hidrasi yang baik. Maka dari itu, Anda perlu mengonsumsi air putih secara maksimal saat sahur dan berbuka supaya tubuh Anda dapat terhidrasi dan menjaga suasana hati yang mudah lelah.

3. Melakukan konsultasi

Jika Anda merasa sulit untuk mengontrol diri, maka opsi yang tepat adalah dengan berkonsultasi kepada pihak yang tepat seperti psikolog maupun psikiater. Tujuannya adalah supaya kesehatan mental Anda dapat terjaga dengan baik, dan menerima segala bentuk masukan serta dukungan yang baik bagi kesehatan.

4. Mengelola stres

Anda dapat mengelola stres dengan cara berada di lingkup orang-

orang yang mengerti dan mendukung segala aktivitas yang dilakukan. Menerapkan kegiatan positif seperti berolahraga ringan seperti yoga, latihan pernapasan, dan meditasi yang dilakukan untuk kebaikan diri sendiri.

5. Mengikuti aktivitas sosial

Mengikuti aktivitas sosial dapat dilakukan dengan cara bergabung dalam sebuah komunitas maupun bersosialisasi bersama masyarakat.

Kegiatan ini akan membuat Anda jauh lebih berkembang dan memahami karakter banyak orang berdasarkan waktu yang singkat.

Anda juga dapat mengelola pikiran dan emosional dengan baik ketika bersosialisasi dengan orang. Hal ini yang membuat sadar dan mengenal siapa diri Anda sebenarnya.

6. Memberikan batasan

Memberikan batasan mengenai kapasitas diri dalam bertindak. Hal ini membuat batasan dalam diri Anda untuk tetap fokus dan menjalani segala sesuatu secara serius. Batasan ini yang membuat emosi dalam diri Anda terkontrol dengan baik tanpa harus memikirkan sebab akibat setelahnya.

7. Meningkatkan kualitas iman

Saat berpuasa, Anda harus meningkatkan kualitas iman dengan cara memperbanyak amal dan ibadah setiap harinya. Perbanyak ibadah dengan membaca kitab suci, melaksanakan salat sunah, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Hal ini yang

membuat diri Anda merasa tenang, tentram, dan nyaman menjalani aktivitas.

8. Memprioritaskan diri sendiri

Ketika menjadi dewasa, yang harus menjadi prioritas adalah diri sendiri. Anda tidak bisa bergantung kepada siapapun kecuali diri sendiri dan Tuhan. Bagaimanapun yang mengerti dan memahami segala emosional dan keinginan adalah diri sendiri, jadi segala sesuatu harus dilakukan dan dikerjakan secara mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain.

9. Berpikir secara positif

Berpikir secara positif akan

mempengaruhi kualitas pemikiran dan pribadi dari individu tersebut. Jika Anda selalu menerapkan berpikir positif, maka hidup Anda akan jauh lebih sempurna tanpa harus memikirkan ketakutan yang belum tentu terjadi. Terkadang emosional menjadi meningkat apabila individu tersebut merasa cemas dan takut terhadap suatu hal.

10. Menerapkan pola hidup sehat secara teratur

Jika Anda mampu menerapkan pola hidup secara teratur dalam hidup, maka hasil yang diperoleh memiliki dampak yang baik bagi tubuh dan pikiran. Hidup sehat bukan sekedar konsumsi makanan yang sehat saja, melainkan dengan menerapkan pola pikir dan pola asuh yang tepat untuk menunjang kehidupan yang jauh lebih baik.

Demi kelancaran puasa dan kehidupan yang sempurna, maka Anda harus pandai mengelola emosi dalam diri. Mengelola emosi tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, melainkan berdampak bagi kehidupan orang lain. Mari sama-sama mengelola dan mengontrol emosi dengan baik, untuk meraih hasil yang gemilang (Bisnis)



Tak Lazimnya... (dari Hal 1)

MENTERI Pertahanan, yang juga presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto hari Minggu (31/3/2024) tiba di Beijing, Cina. Ia disambut langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Cina Sun Weidong, Duta Besar Cina di Jakarta Lu Kang dan Atase Pertahanan Indonesia di Beijing Brigjen TNI (Mar) Benny Poltak. Ada pula Duta Besar Indonesia Untuk Cina Djauhari Oratmangun dan beberapa pejabat Departemen Pertahanan Indonesia dan Cina.

Prabowo melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, Senin sore (1/4/2024) waktu setempat dan dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang dan Menteri Pertahanan Dong Jun pada hari Selasa (2/4/2024).

Kunjungan Prabowo ini dilakukan kurang dari dua bulan, setelah dia memenangkan pemilu untuk memimpin negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini. Kunjungan Prabowo dilakukan atas undangan Presiden Xi untuk mendiskusikan hubungan kedua negara, meskipun dia baru akan dilantik sebagai presiden pada Oktober nanti.

Cina menjadi negara asing pertama yang dikunjungi Prabowo sebagai presiden terpilih, sebelum ke negara-negara tetangga Indonesia di kawasan ini. Langkah ini menggarisbawahi hubungan dekat yang dibangun dalam satu dekade terakhir di bawah pendahulunya yang saat ini masih menjabat, Presiden Joko Widodo.

Sebagai perbandingan, Jokowi tidak melakukan perjalanan ke luar negeri ketika masih berstatus sebagai presiden terpilih, sebelum dilantik.

Namun, kunjungan pertama Jokowi setelah pelantikannya adalah juga ke Cina, untuk KTT tahunan para pemimpin Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 2014. Kunjungan itu diikuti dengan enam kunjungan lainnya hingga 2023.

Sorotan media asing pun mencuat. Menurut Reuters, Cina menjadi negara asing pertama yang dikunjungi Prabowo sebagai presiden terpilih, lebih dulu dibanding ke negara-negara tetangga Indonesia di wilayah tersebut, hal ini menggarisbawahi kemitraan erat yang dibangun dalam satu dekade terakhir di bawah pendahulunya, Joko Widodo.

Sebaliknya, Jokowi, sebutan untuk pemimpin petahana Indonesia, tidak melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai presiden terpilih sebelum dilantik.

Namun, seperti Prabowo, Jokowi juga memilih Cina sebagai negara yang dikunjunginya pertama setelah pelantikannya untuk menghadiri pertemuan puncak tahunan para pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 2014. Kunjungan tersebut diikuti oleh enam kunjungan lagi hingga 2023.

Reuters menyatakan Cina telah

menjadi mitra dagang utama Indonesia selama satu dekade terakhir, karena sumber daya alamnya seperti batu bara dan nikel membantu menggerakkan perekonomian negara terbesar kedua di dunia tersebut.

Cina juga telah mengucurkan dana miliaran dolar untuk proyek infrastruktur dan industri di Indonesia, termasuk kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Prabowo, yang kini menjadi Menteri Pertahanan Indonesia, secara luas dipandang oleh para analis mendapat dukungan dari Jokowi, yang telah bertaruk pada mantan saingan politiknya yang menjadi sekutunya untuk mempertahankan warisannya.

Namun, Reuters menggarisbawahi soal bagaimana Prabowo akan mengatasi masalah-masalah lain, termasuk perebutan pengaruh antara Cina dan Amerika Serikat di Asia Tenggara.

Media Cina Global Times mengungkapkan adanya harapan besar dari kedua belah pihak agar momentum hubungan persahabatan akan terus dipertahankan.

Namun, mereka menuliskan para analis menyisipkan keraguan keberpihakan Indonesia atas rivalitas yang kini dilakukan Cina.

"Para analis mengatakan hubungan yang lebih besar dengan Cina, tidak berarti bahwa Indonesia akan memilih pihak dalam persaingan antara negara-negara besar," tulisnya.

"Indonesia akan bersikeras pada kebijakan non-blok dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani isu-isu regional," tambahna.

Selain bertemu Xi Jinping, Prabowo juga akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Li Qiang.

Kedua belah pihak akan bertukar pandangan dalam hubungan bilateral dan permasalahan yang menjadi perhatian bersama.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lin Jian menegaskan pilihan Prabowo mengunjungi Cina setelah terpilih sebagai Presiden Indonesia, merefleksikan hubungan tingkat tinggi Indonesia-Cina.

Menurut Lin, Cina dan Indonesia adalah negara berkembang yang penting dan merupakan perwakilan dari negara-negara berkembang, dengan persahabatan tradisional yang erat serta kerja sama yang erat dan mendalam.

Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah bimbingan strategis Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo, hubungan kedua negara terus terpelihara, dengan momentum pembangunan yang kuat dan memasuki tahap baru dalam membangun komunitas masa depan bersama.

Konflik Laut Cina Selatan Jadi Ujian

Reuters menyatakan klaim Cina yang luas di Laut Cina Selatan juga dapat menjadi ujian bagi kepemimpinannya, meskipun klaim yang tumpang tindih antara kedua negara tersebut

tidak menjadi perselisihan sengit seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir antara Cina dan Filipina.

Indonesia menyatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah bagian dari zona ekonomi eksklusifnya, dan pada tahun 2017, wilayah tersebut diberi nama Laut Natuna Utara.

Cina menolak klaim tersebut, dengan mengatakan wilayah tersebut berada dalam klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan "sembilan garis putus-putus" berbentuk U, sebuah batas yang menurut Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag tidak memiliki dasar hukum.

Senada dengan Reuters, Time juga menyoroti konfrontasi antara Cina dan Filipina meningkat selama setahun terakhir ketika Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengalihkan kebijakan luar negerinya kembali ke sekutu lama negara tersebut, yaitu A.S. Sejak Marcos menjabat pada tahun 2022, ia telah meningkatkan hubungan keamanan dengan Washington dan sekutunya. Dia juga menegaskan klaim teritorial Filipina, yang tumpang tindih dengan Cina dan negara tetangga lainnya.

Menurut Time, Jokowi telah mempertahankan pendekatan non-konfrontatif mengenai sengketa laut—meskipun klaim Beijing melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia—dan Xi lebih memilih Indonesia untuk melanjutkan pendekatan tersebut. Prabowo mengatakan selama kampanyenya bahwa dia tidak akan memihak dalam perselisihan ini.

Cina mengklaim hampir seluruh jalur perairan yang penting bagi perdagangan global dan diperkirakan mengandung cadangan energi yang sangat besar. Beijing telah mengabaikan keputusan pengadilan internasional tahun 2016 yang mengatakan upayanya untuk menegaskan kendali atas Laut Cina Selatan melanggar hukum.

Kali Pertama Terjadi

Sementara itu, Dosen hubungan internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dafri Agussalim merupakan hal yang tidak lazim jika dilakukan sebagai calon presiden terpilih. Dia mengatakan tidak ada preseden untuk seorang pemimpin negara mengundang calon presiden terpilih negara lain yang belum dilantik secara resmi. "Belum pernah terjadi," katanya.

"Ketika saya membaca berita bahwa Xi Jinping mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih, itu memang sangat mengagetkan. Tidak lazim dalam tata krama hubungan antar negara," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden RI dijadwalkan pada Minggu,

20 Oktober 2024. Adapun kunjungan Prabowo ke Cina dilakukan atas undangan Xi, seperti dilansir Xinhua pada Jumat, 29 Maret 2024, mengutip pengumuman oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying.

Dafri yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center UGM itu mengatakan dengan undangan lebih awal ini mungkin saja Cina mengharapakan jalan yang lebih terbuka dan lancar untuk membuat kesepakatan dengan Indonesia ke depannya.

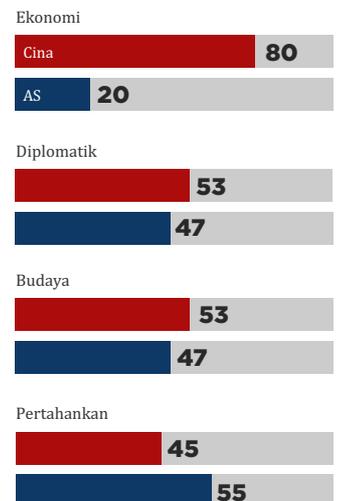
Meski demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan Indonesia akan tetap dekat dengan Amerika Serikat. Sebab, meski dekat dengan Cina dalam sektor ekonomi, Indonesia tetap menjalin hubungan erat dengan Amerika dalam bidang keamanan.

Dafri menilai lawatan Prabowo bertemu Xi mungkin berhubungan dengan rivalitas Beijing dengan Amerika Serikat. "Dalam kacamata saya, bisa saja ini bagian dari strategi Cina untuk 'mendahului' negara-negara lain, terutama rivalnya Amerika, untuk mengundang Prabowo," tuturnya.

Perihal kecondongan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo nanti, ia berkata tidak dapat mengamatinya hanya dengan melihat sosok presiden saja. Menurut dia, perlu juga melihat orang-orang sekitarnya, seperti para pendukung presiden tersebut dan juga oligarki.

Prabowo memiliki latar belakang dalam bidang pertahanan dan militer, sebagai perwira tinggi dan Menteri Pertahanan sejak 2019. "Tapi lihat juga bahwa dia dan keluarganya pengusaha, pendukungnya pengusaha, pendukungnya tidak lepas dari dukungan kekuasaan yang ada," kata Dafri. (wid,reuters,xinhua,time,CGT,ist/dya)

SKOR PENGARUH CINA DAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA BERDASARKAN DARI SEKTOR (2022)





CATATAN FRAKSI DPRD JATIM TERHADAP LKPJ GUBERNUR JATIM AKHIR TAHUN 2023

SURABAYA - Panitia Khusus (Pansus) telah menyatakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 layak dibahas lebih lanjut.

Berikut Pendapat Umum (PU) Fraksi dalam agenda rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi DPRD Jatim terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 bersama Pj. Gubernur Adhy Karyono, Senin (1/4/2024).

Dalam paparan yang dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Agatha menekankan bahwa laporan mengenai investasi pada LKPJ 2023 tidak mencerminkan upaya pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.

"Fraksi PDIP berpandangan bahwa lampiran investasi tidak mencerminkan upaya pembangunan yang telah dinarasikan dalam LKPJ, tidak tampak adanya pemulihan ekonomi kerakyatan dan tidak mengindikasikan keberpihakan pada implementasi prioritas pembangunan," papar Agatha Retnosari.

Agatha menambahkan, bahwa terjadi penurunan serapan tenaga kerja di sektor perdagangan dari 20,08% pada tahun 2022 menjadi 19,10% di tahun 2023 lalu, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,98%.

"Serapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata juga turun padahal sektor pariwisata menjadi andalan begitu pula agro. Dalam LKPJ ini tidak dijelaskan soal relasi komprehensif antara Investasi dengan serapan tenaga kerja melalui pembantuan antara tenaga kerja yang telah ada dan tenaga kerja yang baru terserap, ini harus jadi perhatian Gubernur," tambahnya.

Selanjutnya, Agatha menyampaikan bahwa Kinerja Badan Usaha Milik Daerah harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov, Fraksi PDIP menilai BUMD seperti Bank Jatim masih belum optimal dengan ketersediaan dana yang ada.

"Berdasarkan catatan kinerja dalam LKPJ 2023, hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank Jatim masih konservatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim, terutama penyaluran kredit, sehingga kita dorong Pemprov melakukan langkah strategik," jelasnya.

Fraksi PDIP turut mencermati aspek lain, khususnya mengenai



Pemaparan Pandangan FPDI Jatim oleh Agatha Retnosari terhadap LKPJ Gubernur Jatim 2023, Senin (1/4/2024).

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 yang meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks theil, persentase penduduk miskin, indeks gini, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi, indeks Kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup, dan indeks risiko bencana.

"IKU ini terdiri dari beberapa indikator yang menjadi penilai pencapaian kinerja dari Pemprov. Kita tekankan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan amanat UU di bidang pengawasan jalannya roda pemerintahan Jatim agar dapat terlaksana dengan baik," terangnya.

Mengenai aspek IKU, Agatha menambahkan bahwa PDIP memberikan catatan bahwa prioritas pembangunan harus lebih cermat. Terdapat catatan di Pekerjaan Umum bahwa beberapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik tapi serapan APBD tidak maksimal.

"Dari pembahasan LKPJ ini, harapannya evaluasi dari kami dapat dilaksanakan Pemprov dengan strategi yang terstruktur, sistemik, dan komprehensif agar setiap evaluasi dapat menghasilkan solusi yang berdampak baik untuk jangka panjang dan kebaikan Provinsi Jatim," harapnya.

Kritisi Naiknya Angka Kemiskinan

Sementara itu, Mathur Husyairi selaku juru bicara dari Fraksi PKS, PBB, dan Hanura DPRD Jatim turut memberikan pandangan dan Catatan fraksi terhadap LKPJ Jatim Akhir Tahun 2023. Diawal, ia memberikan pandangan mengenai upaya peningkatan kesejahteraan.

"Kurangnya transparansi dan perencanaan bisa menyebabkan kendala dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di wilayah Jawa Timur,"

ujarnya.

Untuk itu, Mathur berujar bahwa perlu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program yang berkaitan erat dengan aspek kesejahteraan masyarakat.

Terlebih lagi, Mathur menyebut bahwa persoalan yang tidak pernah terselesaikan adalah urusan kesejahteraan, terutama dalam aspek menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat Jatim.

"Ini kan muncul pertanyaan, jika dibilang Gubernur Khofifah telah berhasil menurunkan kemiskinan, lantas perbandingannya dengan kepemimpinan siapa. Kalau pun dibandingkan dengan Gubernur Karwo, itu juga tidak valid karena justru dalam periode Khofifah angka kemiskinan mengalami kenaikan," ungkapnya.

Kritik tajam mengarah ke Pemprov dibawah kepemimpinan Khofifah - Emil karena angka kemiskinan yang cenderung mengalami kenaikan di masa kepemimpinan mereka, muncul desakan untuk membandingkan pencapaian tersebut dengan kepemimpinan Pemprov di periode sebelumnya.

Program kesejahteraan masyarakat saat ini menjadi sorotan bagi fraksi PKS, PBB, dan Hanura yang menganggap bahwa kurangnya kejelasan dan efektivitas terhadap jalannya program di periode Khofifah, misalnya seperti Jatim Sejahtera.

"APBD di era Pakde Karwo hampir tiap tahun selalu ada program pengentasan kemiskinan, mulai dari Jalin Matra hingga Jalin Kesra, sekarang ini tidak jelas," gusar Mathur.

Lebih jauh, Mathur membeberkan bahwa dalam periode Khofifah - Emil sisi transparansi dalam data dan penggunaannya itu masih sangat kurang, sebagai contoh banyak pihak merasa

tertutup dan tidak diberikan akses untuk menggali lebih dalam. Padahal, pihak terkait seperti DPRD sangat memerlukan data mengenai perencanaan program dan pelaksanaannya.

"Data selama ini terkesan tertutup, pihak lain tidak boleh akses. Pihak lain ini lantas siapa? DPRD juga termasuk pihak lain? Padahal kita termasuk dalam Pemerintahan Daerah, itu yang saya tuntut dari Pemprov," tegasnya.

Di LKPJ ini selanjutnya akan didalami mengenai pihak/OPD mana yang harus bertanggung jawab mengentaskan persoalan kemiskinan karena Dinas Sosial kewenangannya sebatas memberikan bantuan saja.

"Dinsos ini juga tidak punya database program Pemprov, ini kan justru akan menyulitkan pihak lain akhirnya, padahal dari sini bisa dibentuk sinergitas antar pihak untuk mengentaskan persoalan kesejahteraan masyarakat," tandas Mathur.

Mathur menilai, jika data yang tersedia oleh Pemprov tidak benar atau tidak valid itu akan sulit untuk merealisasikan program agar tepat sasaran, wajar pada akhirnya persoalan kesejahteraan masyarakat ini tidak selesai karena perencanaannya di awal saja kurang baik.

"Penyampaian catatan dan kritik dari kami ini dimaksudkan agar pengentasan kemiskinan dan persoalan kesejahteraan bisa lebih efektif dan yang terpenting tujuan tepat sasaran by data ini bisa tercapai di setiap program - program Pemprov lainnya," pungkasnya. (Pradhita/lutfi/dya/adv)



Penyerahan Berkas Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur terhadap LKPJ Gubernur Jatim 2023, Senin (1/4/2024).